

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK
TRANS METRO DELI DALAM MENANGANI KEMACETAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

**PUTRI MAYASARI SITORUS
198520086**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK
TRANS METRO DELI DALAM MENANGANI KEMACETAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

Oleh

PUTRI MAYASARI SITORUS 198520086

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/23



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 Juli 2023



Putri Mayasari Sitorus

198520086

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS/ UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Mayasari Sitorus

Npm : 198520086

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK TRANS METRO DELI DALAM MENANGANI KEMACETAN KOTA MEDAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 04 Juli 2023

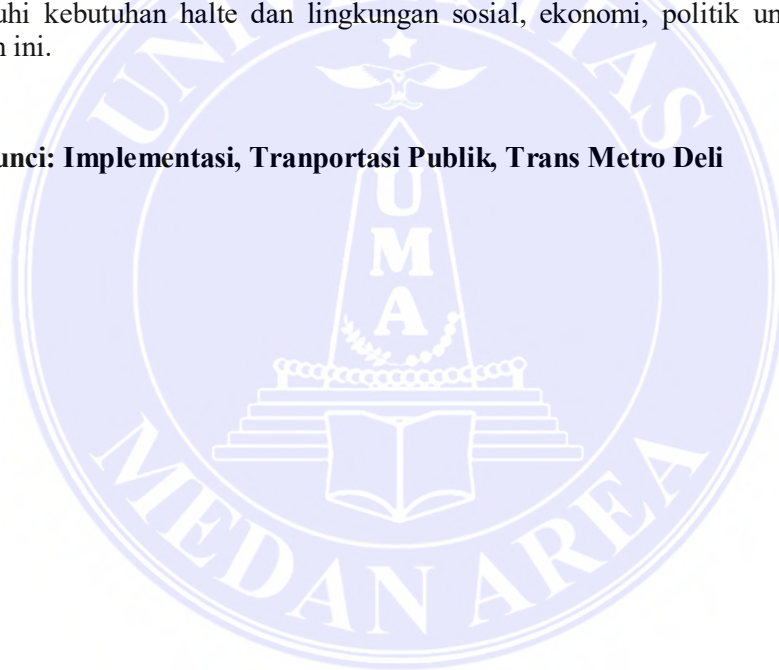
Yang menyatakan


(Putri Mayasari Sitorus)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANS METRO DELI DALAM MENANGANI KEMACETAN KOTA MEDAN

Masalah kemacetan sampai saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan terus meningkatnya jumlah penduduk dan pengguna kendaraan pribadi. Pemerintah berusaha mengupayakan banyak program yang dapat mengatasi kemacetan, salah satunya dengan memberi subsidi pelayanan transportasi publik agar berkurangnya kendaraan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Trans Metro Deli dan faktor-faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan teori Van Horn dan Van Meter yang memiliki enam indikator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana semua rumusan masalah dipecahkan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil observasi, wawancara, dokumentasi peneliti memperoleh hasil bahwa terdapat empat variabel yang terlaksana yaitu standar dan sasaran kebijakan, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi dan dua variabel belum terlaksana dengan baik yaitu sumber daya yang terbagi dua yaitu manusia dan finansial (belum terimplementasi dengan baik) dan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Terdapat dua faktor penghambat yaitu sumber daya finansial dalam fasilitas untuk memenuhi kebutuhan halte dan lingkungan sosial, ekonomi, politik untuk mendorong program ini.

Kata kunci: Implementasi, Transportasi Publik, Trans Metro Deli

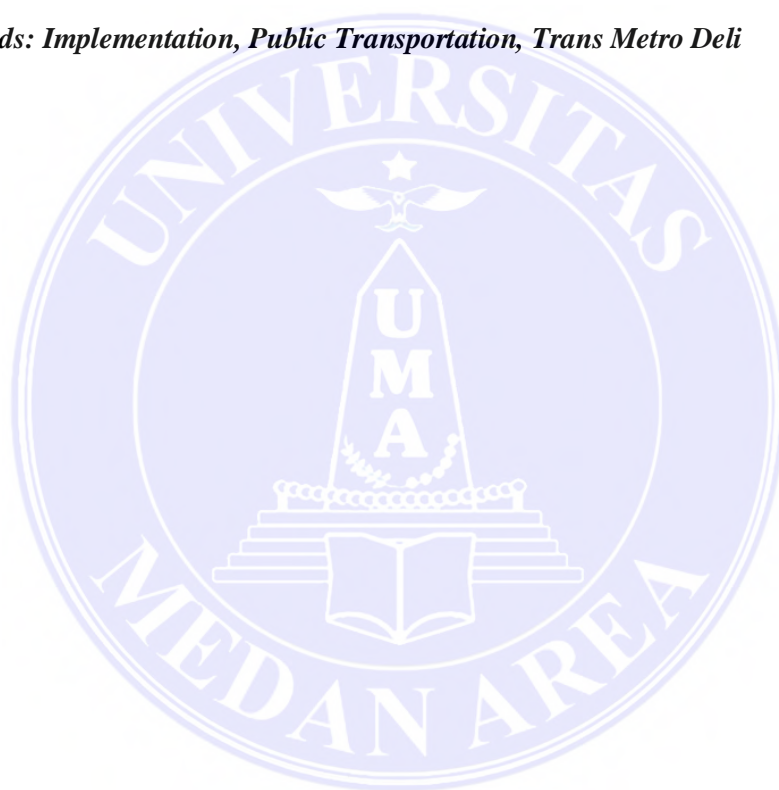


ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE TRANS METRO DELI POLICY IN HANDLING CONGESTION IN MEDAN CITY

Congestion is a pressing issue for Medan City Government, with increasing residents and private vehicle users. To address this, the government is implementing the Trans Metro Deli policy, which has been criticized for its ineffectiveness. The study uses Van Horn and Van Metre's theory and qualitative methods to analyze policy implementation, identifying four variables: policy standards, targets, characteristics, communication, and dispositions, and two unimplemented variables: human and financial resources and the social, economic, and political environment.

Keywords: Implementation, Public Transportation, Trans Metro Deli



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Putri Mayasari Sitorus, anak dari Bapak Pangihutan Sitorus dan Ibu Nurbaya. Lahir di Aek Kanopan pada 15 Januari 2001. Penulis merupakan anak ke-3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara. Penulis bersekolah di TK Nurul Iman Aek Bange pada tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2006 penulis melanjutkan Pendidikan di SD Negeri 112281 Aek Kanopan, dan pada tahun 2012 penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Swasta Sultan Hasanuddin Aek Kanopan, pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan di SMK Swasta Taruna Tekno Nusantara Medan, dan pada tahun 2019 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan gelar Sarjana pada program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Trans Metro Deli Dalam Menangani Kemacetan Kota Medan”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area;
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S. Sos, M.I. Pol selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
4. Ibu Nina Angelia, S. Sos, M. Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan saran bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Marlina Deliana, S. AB, M. AB selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan saran bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
6. Ibu Dra. Nurhayati Harahap, MAP selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran bimbingan dalam penyusunan skripsi ini

7. Bang Riki, Bang Sutris, Bang Redha, dan Bang Riyan yang telah mempermudah saya dalam melengkapi berkas yang akan dipenuhi oleh penulis
8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan
9. Kedua orang tua yang paling saya sayangi dan hormati, Ayah (Pangihutan Sitorus Pane) dan Ibu (Nurbaya S. Pd) yang tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, semangat, membiayai, doa, kasih sayang, dan motivasi maupun nasehat setiap harinya kepada penulis dalam menempuh pendidikan sarjana
10. Dinas Perhubungan Kota Medan dan Pt. Medan Bus Transport serta jajarannya, yang telah bersedia untuk menjadi tempat penelitian dan informan memberikan data untuk keperluan penyusunan skripsi
11. Masyarakat yang bersedia menjadi informan penulis dalam penyusunan skripsi
12. Kedua abang saya yaitu Daniel Pransisco Sitorus dan Baktiar Prayetno Sitorus maupun saudara-saudara saya yang memberi dukungan, semangat, dan nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan selama perkuliahan dan penulisan skripsi
13. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berproses, berjuang, dan tetap semangat walaupun banyak rintangan untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi dan terimakasih selalu ingin mencoba menjadi lebih baik lagi. “Tidak perlu orang lain tahu prosesmu cukup Tuhan dan dirimu sendiri”

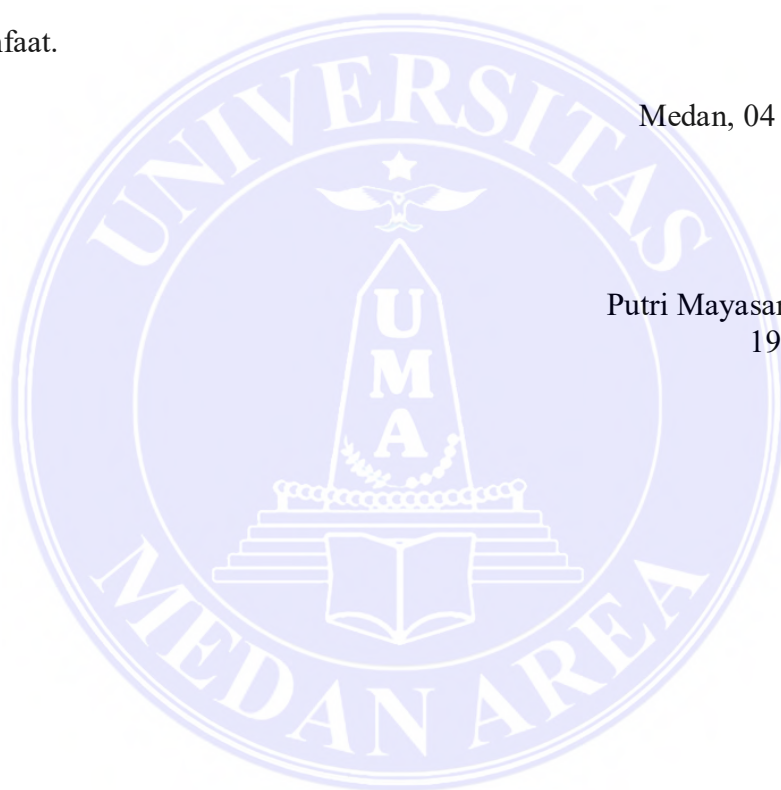
14. Semua teman dan sahabat sekolah maupun kuliah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang menyemangati dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi

15. Seluruh pihak yang mendukung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak pembaca sehingga skripsi ini bermanfaat.

Medan, 04 Juli 2023

Putri Mayasari Sitorus
198520086



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Secara Akademik	5
1.4.2 Secara Praktis	6
1.4.3 Secara Teoritis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kebijakan Publik	7
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	7
2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik	9
2.2 Implementasi	11
2.2.1 Pengertian Implementasi	11
2.3 Model Implementasi	12
2.4 Transportasi Publik	16
2.4.1 Pengertian Transportasi Publik	16
2.4.2 Fungsi dan Manfaat Transportasi Publik	17
2.5 Penelitian Terdahulu	19
2.6 Kerangka Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3 Informan Penelitian	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Gambaran Umum Pt. Medan Bus Transport.....	32
4.1.2 Visi dan Misi Pt. Medan Bus Transport	33
4.1.3 Struktur PT. Medan Bus Transport (Managemen Trans Metro Deli)	33
4.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan BTS Kota Medan 34	
4.1.5 Uraian Tugas (<i>Job Description</i>) Pt. Medan Medan Bus Transport	35
4.1.5 Koridor dan Bus Trans Metro Deli	39
4.2 Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Trans Metro Deli Dalam Menangani Kemacetan Kota Medan	40
4.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan.....	46
4.2.2 Sumber Daya	49
4.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana	54
4.2.4 Komunikasi Antar Organisasi	55
4.2.5 Sikap Pelaksana	57
4.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	60
4.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Trans Metro Deli Dalam Menangani Kemacetan Kota Medan.....	62
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR BAGAN

Bagan	2.4 Kerangka Berpikir.....	22
Gambar	4.1 Tarif Bus Trans Metro Deli.....	45
Gambar	4.2.2 Halte yang Rusak.....	53



DAFTAR TABEL

Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	26
Tabel 4.1	Tugas dan Tanggung Jawab	34
Tabel 4.2	Koridor Trans Metro Deli	40
Tabel 4.3	Bus dan Supir Trans Metro Deli.....	40
Tabel 4.4	Jadwal Operasional Bus dan Nama Halte Trans Metro Deli.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	68
Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Riset	71
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi adalah faktor terpenting dalam pembangunan suatu daerah dan salah satu pondasi pembangunan ekonomi masyarakat serta pertumbuhan industri. Perkembangan transportasi dapat mendorong kegiatan ekonomi dan kemajuan suatu wilayah atau negara. Transportasi merupakan sarana yang berperan terhadap kehidupan sebagai alat yang memperlancar berlangsungnya interaksi antar manusia dan pergerakan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Aktivitas masyarakat ini memerlukan fasilitas pendukung yang sesuai, sarana penunjang meliputi jasa transportasi atau jaringan transportasi Siti Ftimah (2019).

UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dinyatakan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan umum di Kawasan perkotaan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Penumpang Angkutan Perkotaan. Pada Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 05 Januari 2016 dipimpin oleh presiden menyampaikan arahan kepada Menteri Perhubungan agar menyusun rencana dan mencari solusi bagi kota-kota besar di Indonesia yang jumlah penduduknya lebih dari 2 juta, sehingga memiliki transportasi massal, dengan demikian perhatian pemerintah untuk pelayanan publik bagi masyarakat menjadi penting untuk di prioritaskan (Setkab.go.id).

Telah diatur ketentuan mengenai angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor di jalan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya.

Penyelenggaraan angkutan orang dan barang di jalan terutama ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal meliputi unsur keselamatan, kenyamanan, keadilan, dan keterjangkauan. Peraturan pemerintah ini menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat (Kemenhub RI). Tujuan utama pembangunan transportasi publik adalah meningkatkan ketersediaan pelayanan transportasi yang efektif, efisien, andal, aman, dan tepat waktu. Meningkatkan jaringan desa-kota yang memadai, mewujudkan transportasi nasional yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah, dan sistem distribusi yang dapat memberikan pelayanan publik (RPJM Dirjendat Kemenhub RI).

Masalah meningkatnya kemacetan di Kota Medan adalah akibat dari jumlah penduduk yang besar dan kendaraan pribadi semakin padat melebihi target. Dari data yang ada Sumatera Utara ada 6.368.014 unit kendaraan pribadi sepeda motor, di Medan ada 2.724.585 unit dan penduduk Kota Medan 2.460.858 jiwa pada tahun 2022 tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Artinya jumlah kendaraan pribadi di Kota Medan sudah melebihi jumlah penduduk dan tidak sebanding dengan pertumbuhan luasan jalan kota. Kebijakan pemerintah belum mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas atau memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam menangani dan mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Medan. Di sisi lain angkutan umum (angkot) menjadi penyebab kemacetan karena banyaknya supir yang secara sembarangan menaik/turunkan penumpang, berhenti mendadak di jalan, dan parkir sembarangan kendaraan pribadi di sekitar sisi jalan juga sangat mempengaruhi.

Memenuhi tingginya permintaan angkutan umum perkotaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan, pemerintah telah memperkenalkan layanan

angkutan perkotaan melalui program Buy the Service (BTS) yaitu Trans Metro Deli sejak November tahun 2020 agar masyarakat beralih ke transportasi publik yang disediakan pemerintah dapat menjadi solusi mengatasi kemacetan. Penyelenggaraan angkutan umum menjadi tanggung jawab pemerintah. Layanan ini menggunakan armada transportasi darat berupa bus.

Pemerintah kini sudah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 138 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil atas layanan transportasi perkotaan dengan skema pembelian layanan yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagai dasar hukum untuk pemberlakuan tarif terhadap penumpang Buy the Service yaitu di Kota Medan berjumlah Rp. 4.300. yang ditetapkan pada 16 September 2022 dan akan mulai efektif berlaku pada 31 Oktober 2022, Kemenkeu (2022).

Secara umum masyarakat yang tinggal di kota medan sangat membutuhkan transportasi umum terutama bagi pekerja, mahasiswa, dan pelajar untuk memenuhi kebutuhan perpindahan penduduk dengan alasan tidak dapat mengendarai kendaraan pribadi, baik secara fisik, alasan legal tidak mempunyai surat izin mengendarai, dan alasan finansial. Sebaiknya pemerintah kota Medan menyediakan transportasi publik seperti bus antar daerah dengan fasilitas yang baik dan halte untuk transportasi umum dan menerapkan jadwal yang teratur agar kepadatan lalu lintas tidak menumpuk di jam tertentu. Penjelasan diatas bisa di jadikan suatu cara alternatif dalam perbaikan transportasi publik.

Hadirnya TEMAN BUS sebagai ikonik di kota medan yang menjadi layanan kelima dalam program *Buy the Service* (BTS) dan operator yang menjalankan operasi layanan ini di Kota Medan yaitu PT. Medan Bus Transport.

Angkutan ini disebut Trans Metro Deli dengan system transportasi berjenis Bus

Rapid Transit menjadi Penunjang mobilitas banyak masyarakat Kota Medan yang mencakup sampai ke wilayah Belawan, Terminal Pinang Baris, Lapangan Merdeka, Terminal Amplas dan Tembung. Teman Bus di Kota Medan ada sebanyak 72 unit dengan rute layanan di 5 Koridor dimana data ini terdapat dari internet (temanbus.com), sebagai berikut:

- a. Koridor 1: Terminal Pinang Baris – Lapangan Merdeka
- b. Koridor 2: Terminal Amplas – Lapangan Merdeka
- c. Koridor 3: Belawan – Lapangan Merdeka
- d. Koridor 4: Medan Tuntungan – Lapangan Merdeka
- e. Koridor 5: Tembung – Lapangan Merdeka

Adanya subsidi pada transportasi ini diharapkan penggunaannya semakin meningkat dan dapat mengurangi kemacetan. Skema pembelian layanan, penumpang akan membayar tarif lebih rendah karena sebagian tarif dibayarkan oleh pemerintah agar mempermudah semua kalangan masyarakat. Peraturan tersebut dibuat dan ditetapkan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pembelian transportasi publik dengan subsidi kepada daerah. Adapun hingga saat ini ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk menjadi kota penerima program bantuan *Buy the service* yaitu kota yang memiliki penduduk besar namun belum terlayani dengan sarana dan prasarana angkutan umum.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengamati, bertanya kepada penumpang yang rutin menaiki bus tersebut, dan mendeskripsikan **“Bagaimana Implementasi Transportasi Publik Trans Metro Deli Dalam Menangani Kemacetan dan Apa Saja Hambatan Yang Terjadi”** di Kota Medan berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan dari kebijakan transportasi publik untuk mengurangi tingkat kemacetan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latarbelakang diatas, penelitian mengangkat permasalahan yang menarik yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Transportasi Publik Trans Metro Deli dalam menangani kemacetan di Kota Medan?
2. Apa saja faktor hambatan yang mempengaruhi proses Implementasi Transportasi Publik Trans Metro Deli dalam menangani kemacetan di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi transportasi publik Trans metro deli dalam menangani kemacetan Kota Medan berjalan sesuai dengan kebijakan yang sudah diterapkan
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam proses implementasi transportasi publik trans metro deli dalam menangani kemacetan di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademik

Secara akademik semoga penelitian ini memberi pengaruh baik, berkaitan dengan pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik, dan paling utama berpengaruh terhadap implementasi transportasi publik dalam menangani kemacetan di kota-kota besar. Begitu juga penelitian tersebut bisa menjadi hal pendukung atau masukan terhadap penelitian-penelitian kedepannya.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian ini memberi manfaat dan pengaruh terhadap kota Medan dalam penggunaan transportasi publik untuk menangani permasalahan kemacetan yang sampai saat ini masih dalam penanganan. Manfaat bagi penulis semoga dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik maupun implementasi transportasi publik trans metro deli dalam menangani kemacetan di kota medan yang menjadi penulisan karya ilmiah.

1.4.3 Secara Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap semoga penelitian tersebut dapat berguna dan menambah bahan referensi tentang Implementasi Transportasi Publik Trans Metro Deli dalam menangani kemacetan di Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian tentang kebijakan publik dalam dunia politik dimana masing-masing para ahli memberi argument-argument yang berbeda, meskipun pendekatan dan model yang dipakai para ahli menentukan arti kebijakan publik yang hampir sama pengertiannya dari pemaparan di atas dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan sekumpulan program atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah (instansi publik) bertujuan untuk mengatur kepentingan semua masyarakat.

Menurut Wiliam Dunn (2003) dalam Pasolong (2010), kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang berkaitan dengan Lembaga maupun pejabat pemerintah dalam bidang yang bersangkutan paut dengan tugas pemerintah, yaitu pertahanan keamanan, kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan lain-lain. Menurut Nugroho R. (2004) et al, mengatakan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan International disebut sebagai publik *policy*, merupakan aturan yang mengatur kehidupan Bersama yang harus di lakukan dan mengikat seluruh masyarakat. Jika melanggar kebijakan publik akan di kenai sanksi sesuai dengan pelanggarannya oleh Lembaga yang mempunyai tugas yang berkaitan kepada hal tersebut.

Soebarsono (2005), menjelaskan suatu kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang disebut dnegan kerangka kerja kebijakan publik dan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut:

- a. Mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang dicapai yaitu kesulitan tujuan yang harus di penuhi. Semakin rumit pencapaian kinerja kebijakan maka bertambah rumit tujuan suatu kebijakan dan begitu juga semakin sederhana tujuan daripada kebijakan maka bertambah mudah untuk mencapai tujuannya.
- b. Preferensi nilai yang diperkirakan dalam membuat suatu kebijakan. Kebijakan menghubungkan banyak nilai, jadi akan lebih rumit lagi menerapkan suatu kebijakan yang berfokus pada nilai.
- c. Sumber daya yang mendorong kebijakan. Kualitas sumberdaya sangat berpengaruh terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan oleh sumberdaya finansial, material, dan infrastruktur lain.
- d. Kemampuan masyarakat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kemampuan masyarakat yang berkualitas sangat berpengaruh pada suatu kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Lingkungan sekitar. Yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik, akan berpengaruh pada kebijakan dimana tempat suatu kebijakan itu dilakukan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Cara ini digunakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang mempengaruhi kinerja dari kebijakan. Strategi yang dipakai dalam kebijakan tersebut bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoritas atau demokratis.

Kebijakan transporatsi sebagai apa yang dinyatakan, dilakukan, tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut dapat berupa rencana atau sasaran program pemerintah di bidang transportasi. Komitmen kebijakan dapat diartikulasikan dalam Undang-Undang dan Peraturan atau Pidato oleh pejabat pemerintah, program, dan tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dari

definisi di atas, kita dapat melihat bahwa memiliki kata kunci ‘goal’, ‘value’, dan ‘practice’ ketika mendefinisikan kebijakan publik. Dalam kebijakan publik, teori ini mengasumsikan bahwa akan selalu memiliki tujuan sebagai berikut: kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengurangi kemacetan. Sebenarnya, Kota Medan sedang berusaha menerapkan kebijakan lalu lintas semaksimal mungkin.

Peraturan ini secara sederhana dapat dipahami sebagai kebijakan publik dan dapat di artikan sebagai suatu hukum dan tidak hanya itu tetapi harus memahaminya dengan benar dan menyeluruh. Ketika terdapat isu yang berkaitan dalam kepentingan bersama perlu untuk diatur, maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus ditaati dan dirancang serta disepakati oleh yang berwenang. Ketika hal tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, Undang-Undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden, peraturan daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus di jalankan.

2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik

Uddin B dan Soribin (2017), mengatakan tahapan kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi panduan dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bersikap. Hal ini diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta diri sendiri. Dapat diketahui bahwa kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksa dan melarang suatu perilaku (seperti hukum yang mewajibkan membayar pajak penghasilan).

Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling memungkinkan mendapat hasil yang sesuai terhadap apa yang diinginkan. Kebijakan hampir sama dengan suatu keputusan yang dapat diartikan menjadi suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilaksanakan dengan cara menganalisis

kemungkinan-kemungkinan alternatif tersebut bersama dampaknya. Dalam keputusan terdapat pilihan terakhir yaitu bisa berupa tindakan atau opini. Semua berawal ketika perlu melakukan sesuatu, tetapi tidak mengetahui apa yang harus diperbuat. Keputusan dapat dirasakan rasional maupun irrasional dan dapat berasumsi kuat maupun asumsi lemah.

Menurut William Dunn (2003), kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat dimana penyusunannya memiliki beberapa tahapan yaitu:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan proses yang strategis dalam kehidupan kebijakan publik. Proses ini mempunyai ruang untuk memaknai suatu masalah publik dan kepentingan dalam agenda publik. Jika isu berhasil mendapatkan kedudukan sebagai masalah dalam publik dan menjadi yang diutamakan dalam agenda publik, isu tersebut mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari isu lain. Agenda setting sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang diangkat dalam agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) dapat disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan sering muncul karena terjadi perbendaan pendapat antara aktor mengenai arah tindakan yang akan dituju, atau pertentangan pandangan terhadap karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan masalah (*issue*) yang masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan dibicarakan oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut diartikan lalu dicari solusi masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berawal dari pilihan kebijakan yang sudah dibuat. Sama dengan perjuangan

suatu masalah untuk masuk ke agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil sebagai pemecah masalah.

3. Adopsi

Tujuan daripada adopsi dalam tahapan kebijakan untuk memberikan kekuasaan yang sah pada proses pemerintah. Namun jika tindakan legitimasi atau pengesahan dalam masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, masyarakat harus percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah merupakan tindakan yang sah dan mendukung.

4. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan

Penilaian atau evaluasi kebijakan merupakan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi kebijakan tidak hanya dapat digunakan pada tahap akhir, tetapi digunakan pada seluruh proses kebijakan. Evaluasi meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

2.2 Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau pemaparan kebijakan dari pemerintah dapat berupa peraturan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar kebijakan publik dapat berguna dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, intinya pencapaian sebuah tujuan dan tujuannya dapat berupa tujuan antara maupun tujuan sebenarnya tergantung pandangan masing-masing kemudian sebuah implementasi dapat berjalan dengan baik atau gagal dalam mencapai tujuannya. Menurut Dedy Mulyadi (2016),

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak terdapat kebijakan baik yang di buat pemerintah, tetapi kemudian tidak mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara karen tidak dilaksanakan.

Van Meter dan Van Horn, menjelaskan batasan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan beberapa individu pemerintah ataupun swasta untuk mendapatkan tujuan yang sudah dikaitkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha berguna untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu tertentu ataupun melanjutkan usaha dalam mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan.

2.3 Model Implementasi

Keberadaan model implementasi dapat mempermudah pandangan tentang komponen-komponen dari suatu proses, situasi, dan objek yang sedang diteliti. Banyak model implementasi dalam kebijakan publik dan setiap model memiliki kekurangan dan kelebihan nya masing-masing. Penelitian ini berfokus pada model implementasi Van Meter dan Van Horn dapat disebut *A Model of the Policy Implementation Process*. Model tersebut mengikuti pandangan dari kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan.

Penelitian tersebut menggunakan teori sebagai berikut; Model ini diperluas oleh Van Horn dan Van Meter menjelaskan bahwa kinerja kebijakan berkaitan dengan beberapa variable-variabel tersebut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan yang jelas

Keberhasilan suatu kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur pada tingkat pelaksana kebijakan. Saat ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka

akan sulit direalisasikan. Sementara Van Meter dan Van Horn, mengatakan dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan menegaskan standar dan sasaran yang harus di penuhi para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan merupakan penilaian atas tingkat pencapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu implementasi kebijakan dan tergantung pada kemampuannya masing-masing. Manusia adalah sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan maupun implementasi kebijakan maka daripada itu dalam tahap implementasi terdapat sumber daya.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Agen pelaksana organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat kepada implementasi kebijakan. Hal tersebut menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan akan berpengaruh pada ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya dan berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada pelaksana kebijakan yang disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang persuasive dan demokratis, adapun cakupan atau luas wilayah jadi pertimbangan dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Ada dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi, menurut Edward III, sebagai berikut:

a. SOP (*Standard Operating Procedures*)

SOP dikembangkan menjadi respon internal pada keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerja organisasi-organisasi yang kompleks dan luas. SOP bersifat rutin dirancang untuk situasi masa lalu dapat menghambat perubahan kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi maupun program yang baru. SOP dapat menghalangi implementasi kebijakan baru yang menggunakan cara-cara baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan dan bertambah besar kenijakan membutuhkan perubahan dalam cara rutin dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

b. Fragmentasi

Tekanan diluar unit birokrasi, misalnya komite, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konsitusi Negara dan sifat kebijakan yang berkaitan terha dap birokrasi publik. Fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab kepada suatu wilayah kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Bertambah banyaknya aktor dan badan yang terlibat dalam kebijakan tertentu semakin kecil kemungkinan keberhasilan pada implementasi.

4. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan Pelaksana

Kebijakan publik dilaksanakan dengan efektif menjadi standar tujuan yang harus dimengerti oleh para individu (*implementors*) yang bertanggung jawab atas pencapaian, maka itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana menjadi standar dan tujuan yang konsisten dari banyak sumber informasi. Jika suatu standar dan tujuan tidak berjalan

dengan baik akan sulit mencapai standar dan tujuan suatu kebijakan dari kejelasan tersebut para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan dari apa yang harus dilakukan.

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap Para Pelaksana dipengaruhi pada pandangannya dari suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan pribadi. Van Meter dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali dengan penyaringan lalu melalui persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu terlaksana.

6. Lingkungan Sosial, ekonomi, dan politik

Dan terakhir yang perlu diperhatikan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan yaitu sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena upaya implementasi kebijakan mengharuskan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Model Implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak bertujuan mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program karena dalam kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, namun gagal memperoleh dampak substansi yang sesuai karena kebijakan tidak terstruktur dengan baik karena faktor lain.

2.4 Transportasi Publik

2.4.1 Pengertian Transportasi Publik

Transportasi Publik sering disebut angkutan umum merupakan alat sebagai kendaraan yang dapat di gunakan masyarakat untuk perjalanan kerja, sekolah, dan wisata. Biasanya transportasi publik banyak di temui pada kota-kota besar yang memiliki penduduk ramai dimana banyak perantau yang tinggal dan menetap untuk sementara misalnya mahasiswa dari pedesaan atau perkampungan kuliah ke kota medan pasti mahasiswa sangat membutuhkan angkutan umum. Angkutan berasal dari Bahasa latin *Transportare, Trans* yang berarti samping (seberang), tempat (lokasi), dan *portare* berarti mengangkut atau membawa.

Adisasmita (2011) dalam buku Siti Fatimah (2019) mengatakan, Transportasi adalah sarana penghubung antar daerah atau sering disebut menjembatani produsen dengan konsumen antara pihak yang saling membutuhkan. Transportasi merupakan kegiatan jasa pelayanan (*service activities*) diperlukan untuk membantu kegiatan sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor keuangan, sektor pemerintahan, transmigrasi, dan lainnya guna mengangkut barang dan manusia sesuai dengan kegiatan sektornya. Oleh karena itu jasa transportasi dikatakan sebagai *derived demand*, artinya permintaan jasa transportasi bertambah karena diperlukan untuk melayani berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang meningkat.

Misalnya, akan mengembangkan daerah baru di mana tidak ada permintaan di daerah itu jika sistem infrastruktur transportasi tidak ada. Dengan kondisi tersebut, sarana transportasi sangat penting bagi aksesibilitas wilayah dan mempengaruhi tingginya minat masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Ini menjelaskan peran kedua infrastruktur transportasi yang mendukung pergerakan orang dan barang.

2.4.2 Fungsi dan Manfaat Transportasi Publik

Fungsi Transportasi adalah sebagai alat penunjang pembangunan yang memberikan pelayanan untuk pengembangan dan peningkatan berbagai kegiatan pada sektornya, misalnya sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lainnya, Rahardho (2010) dalam buku Siti Fatimah (2019). Hal tersebut menunjukkan pentingnya transportasi di Indonesia sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi mutlak diperlukan. Peranan transportasi dalam kehidupan manusia setiap hari, perekonomian dan pembangunan semakin penting digunakannya sarana angkutan modern yang berkecepatan tinggi dan berkapasitas muat besar.

LPKM-ITB mengutarakan, dari perspektif system transportasi perkotaan, angkutan umum adalah bagian integral dari system transportasi perkotaan dan perannya merupakan komponen yang sangat penting. Kondisi angkutan umum yang buruk dikatakan penting karena menyebabkan penurunan efektivitas dan efisiensi system transportasi perkotaan secara keseluruhan. Hal ini akan mengganggu seluruh system perkotaan, baik dari segi pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat maupun dari segi kualitas hidup perkotaan.

Manfaat transportasi yang dapat kita ketahui antara lain sebagai berikut:

a. Hemat

Tarif angkutan umum lebih murah dari mobil pribadi. Harga mulai dari Rp 3.500/trip memungkinkan anda untuk bepergian dengan nyaman dan aman tanpa kepanasan. Angkutan umum kini menawarkan layanan *cashless* melalui kartu *e-money* atau *e-wallet* sehingga penumpang

tidak perlu membawa uang tunai. Tentu saja, ini mengurangi biaya perawatan kendaraan dan membebaskannya untuk kebutuhan lain.

b. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Menggunakan transportasi umum untuk mengurangi frekuensi penggunaan mobil pribadi dan mengendalikan emisi karbon dioksida dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan merupakan program *go green*. Kita adalah pengaruh positif tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain dan dunia.

c. Keamanan dan Kenyamanan erjamin Transportasi

Trans Metro Deli mengutamakan keamanan dan kenyamanan. Ada kursi-kursi yang layak, nyaman, ac, bus luas, dan pengawasan video untuk menjegah kejahatan. Penggunaan angkutan umum secara tidak langsung dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Tingkat kecelakaan yang lebih rendah tentu akan mengurangi kerugian kota.

d. Tubuh Banyak Bergerak

Kita bisa mendapatkan pergerakan lebih banyak dengan menggunakan transportasi umum. Misalnya, ketika berjalan kaki ke halte. Aktivitas fisik meningkatkan sirkulasi darah dan merangsang organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Hal ini sangat membantu bagi mereka yang tidak memiliki banyak kesempatan untuk olahraga.

e. Tidak perlu mencari tempat parkir

Menghemat waktu dengan menggunakan angkutan umum karena membutuhkan waktu untuk mencari tempat parkir gratis dan aman. Itu membuat hal pusing karena harus melihat-lihat ketika semua penuh.

Ini adalah keuntungan dari transportasi umum.

f. Memperkuat dan menambah relasi lingkungan sosial

Diangkutan umum kita akan bertemu orang baru untuk diajak mengobrol. Itu secara otomatis membuat tempat yang lucu, tetapi itu bukan tidak mungkin. Ketika kita dapat meningkatkan koneksi dan memperluas hubungan hanya karena ada transportasi umum.

g. Berpergian sendiri atau berkelompok

Baik anda berpergian dengan teman dan keluarga atau berpergian sendiri, transportasi umum bisa menyenangkan. Angkutan umum Kota Medan khususnya bisa singgah di destinasi wisata tertentu. Angkutan umum semakin menjanjikan. Kita bisa menggunakan transportasi umum untuk menghabiskan liburan di tempat-tempat wisata.

Jika kita memahami kelebihan dan manfaat yang disebutkan di atas, tidak ada alasan untuk menyerah pada transportasi umum. Kembali ke transportasi umum menguntungkan banyak bidang kehidupan: diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Mari kita gunakan angkutan umum dan menjaga daerah Bersama-sama.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu bahan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan dapat memperkaya teori untuk pembuktian penelitian. Dari penelusuran sebelumnya, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis dengan judul penelitian saat ini. Namun peneliti telah mengajukan beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan peneliti dalam karya peneliti. Dibawah ini adalah penelitian-penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Keterangan
1	Kebijakan Transportasi Umum (Angkot) Untuk Menanggulangi Kemacetan	Program yang diterapkan Kota Malang adalah system jalan satu arah di wilayah UB dapat dioperasikan dengan lancar, penerapan parkir miring di beberapa daerah. Kota Malang telah menyusun kebijakan berbasis aplikasi atau online, dengan fokus pada angkutan umum (angkot). Sudah trial run pada April 2020, namun kebijakan ini belum diberlakukan karena terkandala situasi saat ini.	Persamaan dalam penelitian terdahulu adalah metode penelitiannya dan perbedaannya adalah lokasi penelitiannya	Jurnal
2	Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Dan Pelayanan Angkutan Umum Trans Metro Pekanbaru	Ketersediaan Trans Metro Pekanbaru hingga 90 responden merasa terbantu. Trans Metro Pekanbaru dipilih karena jumlah responden yang tersedia maksimal 79. Akses menuju halte juga mudah dijawab oleh 72 orang. Tarif ongkos, yang menurut 83 responden murah. Sebanyak 55 responden memberikan tanggapan positif tentang keamanan dan kenyamanan saat berkendara di Trans Metro Pekanbaru dan halte.	Persamaan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan perbedaannya adalah lokasi penelitian	Jurnal
3	Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kepadatan Lalu Lintas Di Medan	Kepadatan dan kemacetan dapat diatasi melalui kebijakan transportasi yang lebih efektif, penegakan aturan yang konsisten oleh pelaksana kebijakan dan kesadaran masyarakat akan kepatuhan aturan kebijakan	Dalam penelitian terdahulu persamaannya adalah sama-sama membahas Transportasi Publik dan sama menggunakan metode kualitatif dan perbedaannya adalah teori yang digunakan	Jurnal
4	Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Bus Trans Jakarta (BUSWAY) Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan	Hal ini memberikan efisiensi waktu dan biaya dalam memindahkan penumpang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum seperti Bus Trans Jakarta. Perlu	Dalam penelitian terdahulu persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan	Jurnal

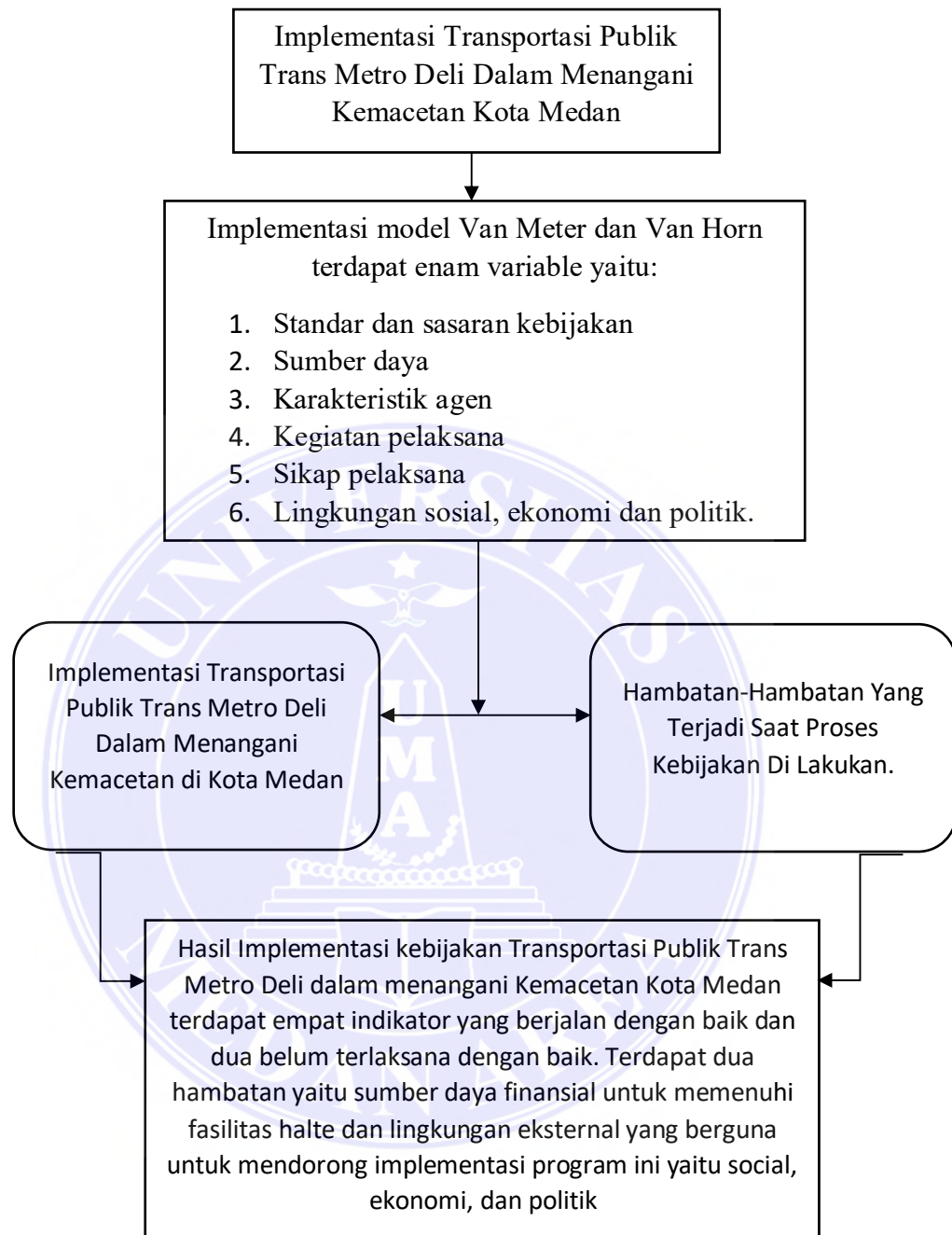
No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Keterangan
		a adanya kebijakan yang mengatur pelayanan publik berpedoman pada Bus Rapid Transit (BRT) yang akan meningkatkan kenyamanan penumpang selama perjalanan.	perbedaannya adalah lokasi penelitian	
5	Evaluasi Halte BusTrans Metro Deli Di Koridor Lima Medan Lapangan Merdeka-Tembung Terhadap Naik Turun Penumpang Bus trans Metro Deli	Hasil survei persepsi masyarakat Kota Medan terhadap pelayanan dan fasilitas Bus Trans Metro Deli menunjukkan respon Positif dan baik.	Persamaan dalam penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas Bus Trans Metro Deli dan perbedaan dengan penelitian terdahulu menggunakan teori Evaluasi	Skripsi

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan di teliti. Hubungan variabel dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian oleh karena itu setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Dalam penyusunan kerangka berpikir, peneliti memerlukan alur pola piker ilmiah yang mempunyai sifat skeptis, analitis, dan kritis menurut Iwan Hermawan (2019). Kerangka pemikiran adalah diagram berupa konsep-konsep yang menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Dalam kerangka pemikiran terdapat hubungan teoritis dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi oleh peneliti sebagai isu-isu kunci. Dalam hal ini, ide adalah masalah topik penelitian. Skema pemikiran dari peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.4 Kerangka Berpikir



Kebijakan Transportasi Trans Metro Deli dalam rangka menangani kemacetan Kota Medan dimana kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan Kota tertib dalam menggunakan transportasi umum atau pribadi. Seperti yang di kemukakan oleh Van meter dan Van horn implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan semua orang untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Adanya kebijakan transportasi publik ini di dukung dalam pasal 158 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Penumpang Angkutan Perkotaan.

Terdapat dalam Teori Van Meter dan Van Horn enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Kegiatan Pelaksana, Sikap Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan transportasi publik trans metro deli dalam menangani kemacetan kota Medan dan faktor hambatan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan transportasi publik trans metro deli dalam menangani kemacetan kota Medan, seperti yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dimana implementasi kebijakan adalah tindakan semua orang terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya dengan melibatkan Instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan.

Hasil Implementasi kebijakan Transportasi Publik Trans Metro Deli dalam menangani Kemacetan Kota Medan terdapat empat indikator yang berjalan dengan baik dan dua belum terlaksana dengan baik. Terdapat dua hambatan yaitu sumber daya finansial untuk memenuhi fasilitas halte dan lingkungan eksternal yang berguna untuk mendorong implementasi program ini yaitu sosial, ekonomi, dan politik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan langsung dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di suatu tempat dan tidak berkaitan dengan angka. Penelitian Kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik tetapi dengan cara pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan biasanya berhubungan dengan kehidupan sosial. Peneliti menggunakan pendekatan naturalistik agar memahami suatu fenomena tertentu berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang rinci.

Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018), mencantumkan beberapa karakteristik Penelitian Kualitatif sebagai berikut:

1. Penelitian kualitatif memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitiannya
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif
3. Peneliti kualitatif bekerja dengan fokus pada proses dan hasil merupakan keniscayaannya
4. Penelitian kualitatif dalam cara analisis datanya dilakukan secara induktif
5. Penelitian kualitatif menjadikan “makna” sebagai yang esensial
6. Penelitian kualitatif menjadikan fokus studi sebagai batas penelitian
7. Penelitian kualitatif desain awalnya bersifat tentatif dan verifikatif

8. Penelitian ini menggunakan kriteria khusus untuk ukuran keabsahan data.
9. Penelitian ini untuk kepentingan *grounded theory*.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Suwarma Al Muchtar (2015), sebuah situs penelitian adalah tempat peneliti mendapatkan informasi tentang data yang mereka butuhkan. Lokasi penelitian merupakan tempat untuk menjalankan teknik analisis data yang dilakukan. Pemilihan lokasi harus di dasarkan pada daya tarik, keunikan dan kesesuaian dengan tema yang dipilih. Dengan memilih lokasi tersebut, penulis perlu menemukan lokasi baru yang bermakna.

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kota Medan, dimana penulis mengunjungi melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi ke Dinas Perhubungan Kota Medan (Jl. Pinang Baris, Lalang, Kecamatan. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), Kantor PT. Medan Bus Transport (Jalan. Menteng VII No 15, Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20228), Koridor 1: Terminal Pinang Baris – Lapangan Merdeka, dan Koridor 4: Medan Tuntungan–Lapangan Merdeka (Halte Bus) dengan melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap Kepala Seksi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Manajer Pt. Medan Bus Transport, Pegawai (supir), dan Masyarakat (Penumpang) Bus Trans Metro Deli.

2. Waktu Penelitian

Berikut tabel waktu penelitian sesuai jadwal yang akan di laksanakan.

Tabel. 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Sep
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	Penyusunan Proposal	■	■								
2	Seminar Proposal		■								
3	Perbaikan Proposal		■	■							
4	Pengambilan Data Penelitian			■	■						
5	Penyusunan Skripsi			■	■	■					
6	Seminar Hasil						■	■	■	■	■
7	Perbaikan Skripsi							■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau								■	■	■

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

3.3 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang mengetahui informasi mengenai hal yang akan atau sedang diteliti. Dimana sumber dari penelitian ini merupakan hasil dari wawancara secara tatap muka disebut dengan narasumber. Berapa jumlah informan minimal dan maksimal atau jumlah ideal, informan yang dipilih menggunakan syarat validitas informasi. Karena persyaratan validitas dipenuhi dengan menentukan jumlah informan yang memberikan informasi yang cukup, metrik untuk menentukan jumlah informan bagi peneliti adalah kedalaman informasi yang cukup, bukan representasi. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, ada tiga kriteria untuk menentukan jumlah informan.

1. Peneliti dapat menambah jumlah informan jika informasi dirasa kurang memadai. Misalnya pencarian dirancang untuk memasukkan tiga

informan utama, namun dari wawancara terdapat variable atau indikator yang belum terinformasikan secara lengkap. Dalam hal ini peneliti dapat menambah informan tambahan sampai informasi yang diperoleh cukup.

2. Peneliti dapat mengurangi jumlah informan jika informasi yang mereka anggap cukup memadai. Misalnya penelitian ini dirancang untuk memasukkan 5 informan, ternyata dengan dua informan sudah cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dapat menghentikan proses pengumpulan data dengan hanya dua informan.
3. Jika informan tidak kooperatif dalam wawancara, peneliti dapat mengganti informan, misalnya jika informan tidak menjawab dengan benar dan tampak sengaja memberikan informasi palsu peneliti dapat berhenti mengumpulkan data dari informan.

Informan dalam penelitian merupakan orang atau narasumber yang memiliki informasi objek penelitian. Dalam penelitian Kualitatif terdapat beberapa informan yang mengetahui sedikit banyaknya terhadap suatu yang akan diteliti. Dimana informan dalam penelitian tersebut terdapat tiga yaitu Informan kunci, informan utama, dan informan tambahan.

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang yang memahami atau orang yang paling berkaitan terhadap sesuatu yang di lakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu Kepala Seksi Angkutan Jalan di Dinas Perhubungan dan Manajer Pt. Medan Bus Transport Kota

Medan yang bertanggung jawab terhadap hal ini yaitu: Bapak Ranto Agustinus Simangkalit, S. H dan Bapak Pahala Sitorus.

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang berpengaruh terhadap objek yang diteliti secara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama pegawai (supir) yang terkait terhadap Bus Trans Metro Deli yaitu: Bapak Arianto Laoli dengan Kode Bus TB. I 05 beserta rekannya Bapak Andika yang mengendarai dengan Kode Bus TB. I 03.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan orang yang sering menggunakan layanan dari pada Bus Trans Metro Deli. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan yaitu masyarakat kota Medan yang merupakan penumpang Bus Trans Metro Deli yaitu: Pelajar (SMK Negeri 11 Medan), Mahasiswa (Nora, Krisda dan Nia, dan Pekerja (Ibu Inney).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014), Dua hal penting yang berpengaruh kualitas data hasil penelitian yaitu, kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian berkaitan dengan validitas, reliabilitas instrument dan berkenaan ketepatan cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian dimana dalam pengambilan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Data yang dimaksud bukanlah berupa angka melainkan lisan, tulisan, dan gambar untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

Berikut tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan langkah pengumpulan data yang secara langsung turun ke tempat penelitian untuk mengunjungi dan mengamati lokasi penelitian dengan melibatkan partisipan yang berkaitan maka data akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui hal yang setiap hari kelihatan di lokasi. Penulis langsung mendatangi, bertanya, meminta izin ke instansi yang berkaitan seperti dinas perhubungan, Pt. Medan Bus Transport, dan koridor bus trans metro deli untuk melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dengan cara bertanya kepada informan yang terkait dengan berhadapan langsung. Penulis tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di rancang sebelum bertanya kepada informan atau masyarakat. Penulis juga berkunjung ke halte bus trans metro deli untuk mewawancarai penumpang dan supir bus tersebut. Sugiyono (2014), mengatakan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan pengamatan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti dengan cara terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi (*documentation*) merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data berupa gambar atau foto yang secara langsung

di ambil oleh peneliti. Penulis mengunjungi lokasi penelitian dengan mengambil beberapa gambar yang berkaitan dengan apa yang di teliti pada saat observasi dan wawancara dengan informan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode untuk mengumpulkan informasi yang di dapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi secara efisien setelah itu penulis dapat membuat kesimpulan. Sugiyono (2019), menjelaskan bahwa analisis data penelitian tersebut dilakukan pengumpulan data secara langsung dalam waktu tertentu. Saat wawancara sudah melakukan analisis untuk jawaban yang diwawancarai.

Penelitian yang belum menghasilkan analisis yang memuaskan, maka peneliti melanjutkan memberi pertanyaan lagi, sampai memperoleh data yang dapat dipercaya. Berikut langkah-langkah analisis data model pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan sehari-hari hingga berbulan-bulan agar memperoleh data yang banyak. Diawal penulis melakukan penelitian secara umum terhadap situasi sosial.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan harus dicatat dengan rinci dan teliti. Mereduksi data adalah meringkas atau merangkum, memilah atau memilih hal-hal penting, fokus, mencari pola dan tema yang terkait. Selanjutnya

data yang direduksi akan memrikan gambaran lebih jelas dan mempermudah penulis melakukan pengumpulan data kedepannya.

3. Penyajian data

Tahapan penyajian data dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat. Penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya menurut pemahaman tersebut.

4. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian, kesimpulan awal dikatakan masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data. Kemudian apabila kesimpulan yang di temukan benar sesuai dengan bukti peneliti kembali ke lokasi untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil baru dan belum pernah ada sebelumnya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian implementasi kebijakan transportasi publik trans metro deli dalam menangani kemacetan kota Medan yang sudah dilaksanakan, maka hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Transportasi Publik Trans Metro Deli telah memberikan kontribusi positif dalam menangani kemacetan di Kota Medan. Terdapat enam variabel dari teori Van Meter dan Van Horn yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Sikap Pelaksana (Disposisi), dan Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Empat indikator yang terimplementasi dengan baik adalah Standar dan Sasaran Kebijakan (sudah mencapai sasaran yang tepat yaitu masyarakat Kota Medan), Karakteristik Organisasi Pelaksana (karakter yang dimiliki para pelaksana yang profesional kinerja dalam program ini), Komunikasi Antar Organisasi (terjalin komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat terhadap kebijakan), dan Sikap Pelaksana (pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki pelaksana). Dua yang belum terimplementasi dengan baik adalah Sumber Daya (dana yang untuk memperhatikan fasilitas halte bus) dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik (lingkungan eksternal yang sangat mempengaruhi terlaksananya program ini belum kondusif).

2. Faktor penghambat implementasi kebijakan transportasi publik trans metro deli dalam menangani kemacetan kota Medan yaitu: Belum terealisasinya indikator sumber daya finansial yang merupakan kurangnya dana untuk fasilitas yaitu halte masih banyak yang belum sesuai dengan prosedur, banyak yang sudah rusak, masih menumpang dengan halte bus mebidang dan kurang mendukungnya indikator lingkungan eksternal yaitu sosial, ekonomi, dan politik untuk terlaksananya implementasi kebijakan transportasi publik dengan Kurangnya kesabaran, kesadaran pola pikir yang baik, dan tata tertib masyarakat dalam berlalu lintas (kondusif) sehingga sering terjadi salah paham dengan trans metro deli di jalan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, peneliti merekomendasi saran-saran untuk mendukung terlaksananya trans metro deli dengan baik yaitu:

1. Terus meningkatkan jangkauan rute dan frekuensi Transmetro Deli dengan memperluas wilayah operasionalnya. Hal ini akan memastikan bahwa lebih banyak masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan ini.
2. Dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna, penting untuk memastikan kualitas, fasilitas, dan kebersihan armada Transmetro Deli. Perawatan rutin, pemeliharaan, dan kebersihan yang baik harus menjadi prioritas untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif.
3. Mengadakan edukasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan mendukung penggunaan transportasi publik, termasuk keunggulan Trans Metro Deli.

4. Pemerintah Kota Medan juga harus lebih menertibkan dan memperhatikan lalu lintas terhadap pengguna kendaraan pribadi.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan Transmetro Deli dapat terus meningkatkan efektivitasnya dalam mengatasi kemacetan di Kota Medan dan menjadi solusi transportasi yang lebih berkelanjutan dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azis, Rudi. 2014. *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Dunn, W. N. 2003 *Pengantar Analisis Kebijakan Public (terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatimah, Siti. 2019. *Pengantar Transportasi*. Jawa Timur: Myria Publisher.
- H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Hermawan, Iwan. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Unisri Press.
- Riant Nugroho Dwijowijoto. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soebarsono A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Uddin B. Sore dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.

Jurnal dan Skripsi

- Aminah, Siti. (2018). Transportasi dan Akseibilitas Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Teknik Sipil*, 9.
- Ary Fabrian. (2022). Implementasi Bus Trans Metro Deli Sebagai Transportasi Publik Di Kota Medan. *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Medan Area. Medan.
- J. Ariesandi, R. Resita. (2020). Kebijakan transportasi umum (Angkot) untuk menanggulangi kemacetan jalan. *Jurnal kebijakan publik*, 11, 55-112.
- Kurniawan, Irvan. (2019). Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Bus Trans Jakarta (BUSWAY) dalam rangka mengurangi kemacetan. *Jurnal ilmiah ilmu administrasi*, 9.
- Muhammad Rizki Pratama. 2021. Evaluasi Halte Bus Trans Metro Deli Di Koridor 5 Medan Lapangan Merdeka-Tembung Terhadap Naik Turun Penumpang Bus Trans Metro Deli. *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- P. Astuti, R. Marsela, M. Mardianto et al. (2018). Persepsi masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan angkutan umum Trans Metro Pekanbaru. *Jurnal Saintis*, 18, 23-32.

Resty Nawati wau. 2021. Efektivitas Program Trans Mebidang Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Massal Di Kota Medan. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

S. Siregar, W. Wardaya, D. Tas'an. (2017). Implementasi Kebijakan Transportasi Publik dalam mengatasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas di Medan. *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik (JMTRANSLOG)*, 4, 147.

Sambuaga, Rinto. (2016). Manajemen Penanggulangan Kemacetan Transportasi Publik Di Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal ilmiah masyarakat*, 1.

Regulasi

[UU RI]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: UU RI

[PM]. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum Perkotaan. Jakarta: PP

[PM]. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP. Jakarta: PP

Artikel

<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/pmk-138-tahun-2022-upaya-pemerintah-menyediakan-transportasi-publik-di-perkotaan>

<https://jdih.dephub.go.id/index.php/read/informasi/UVdKemRISmhhM05wSUZCbGNtRjBkWEpoYmlCUVpXMWxjbWx1ZEdGb0lFNXZiVzl5SURjMEIGUmhhSFZ1SURJd01UUT0=>

<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/komunikasi-publik-rpmk-tarif-pnbp-yang-bersifat-volatil-pada-kementerian-perhubungan-layanan-buy-the-service-sebagai-moda-baru-transportasi-publik-di-perkotaan>

<https://medan.kompas.com/read/2022/07/06/194502278/trans-metro-deli-harga-tiket-rute-dan-jam-operasional-layanan-teman-bus-medan?page=all>

<https://temanbus.com/medan/>

Ni Kadek Widiastuti. (2020). *Dikes. Provbali. Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

Indikator	Informan	Pertanyaan
Standar dan Sasaran Kebijakan	1. Informan Kunci 2. Informan Utama 3. Informan Pendukung	1. Apa visi dan misi Bus Trans Metro Deli tersebut? 2. Menurut anda bagaimana penerapan standar dan tujuan transportasi ini sesuai dengan yang di harapkan? 3. Dengan adanya program pemerintah dengan menerbitkan bus ini apakah ada tujuan khusus untuk perubahan transportasi di Kota Medan terkait kemacetan? 4. Apakah ada pencapaian atau sasaran yang harus dicapai berdasarkan standar kebijakan yang dilaksanakan?
Sumber Daya	1. Informan Kunci 2. Informan Utama 3. Informan Pendukung	1. Berapakah Jumlah SDM (supir) saat ini? Apakah sudah memenuhi dan sesuai dengan jumlah Bus tersebut? Dan membutuhkan beberapa banyak 1 hari supir yang beroperasi? 2. Berapakah jumlah bus saat ini? Apakah sudah sesuai dengan berapa yang dibutuhkan atau di sesuaikan setiap daerah (kota) yang terdapat kebijakan transportasi tersebut? 3. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM (Pegawai)? 4. Bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan kebijakan? 5. Dari mana sumber anggaran pelaksanaan kebijakan untuk pemenuhan fasilitas transportasi tersebut? Apakah anggaran tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan bus ini?

Karakteristik Organisasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan Kunci 2. Informan Utama 3. Informan Pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada organisasi yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan transportasi tersebut? (Atau kerjasama dengan instansi lain) 2. Karakteristik organisasi seperti apa yang dibutuhkan dalam kebijakan tersebut? 3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh organisasi pelaksana (para pemerintah) kepada petugas/pegawai yang bekerja di lapangan?
Komunikasi Antar Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan Kunci 2. Informan Utama 3. Informan Pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana komunikasi yang terjalin antar instansi ini maupun organisasi lain dengan BusTrans Metro Deli? 2. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara atasan dengan para pekerja di lapangan? 3. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara pegawai dengan para penumpang apakah sudah sesuai dengan sop yang diterapkan?
Sikap Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan Kunci 2. Informan Utama 3. Informan Pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh organisasi pelaksana (Dishub dan Operator) kepada petugas/pegawai yang bekerja di lapangan? 2. Apakah pegawai trans metro deli sudah melaksanakan kebijakan dengan baik? terutama dalam pengoperasian bus di lapangan? 3. Bagaimana pembagian waktu/shif kerja bagi setiap pegawai di lapangan? 4. Sikap pelaksana pegawai seperti apa yang harus diterapkan berdasarkan standar kebijakan program tersebut?
Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan Kunci 2. Informan Utama 3. Informan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada sosialisasi terkait program transportasi ini kepada Masyarakat dan apa saja bentuk sosialisasi yang dilakukan? 2. Bagaimana lingkungan sosial

	Pendukung	antara pegawai dengan masyarakat di transportasi ini? 3. Seperti apa kondisi ekonomi masyarakat yang menggunakan trans metro deli tersebut? 4. Bagaimana tanggapan masyarakat perihal kebijakan tarif harga yang sudah di terapkan? 5. Apakah ada kerjasama politik yang terlibat dalam kebijakan tersebut? Jika ada bagaimana cara kerja antara organisasi dengan pihak Bus?
--	-----------	--



Lampiran II Surat Keterangan Selesai Riset



PT. MEDAN BUS TRANSPORT PENGANGKUTAN UMUM

Kantor : Jl. Menteng VII No. 15 Telp. (061) 7850444

SURAT KETERANGAN

Nomor :130/Sket/MBT-BTSTMD/III/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Iis Megawati

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

Menerangkan bahwa:

Nama : Putri Mayasari Sitorus

NPM : 198520086

Prodi : Administrasi Publik

Yang bersangkutan telah selesai melakukan pengambilan data/riset di PT. Medan Bus Transport (Trans Metro Deli) pada tanggal 27 Februari 2023 s.d 08 Maret 2023.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 Maret 2023

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan,



Iis Megawati

NIP.55699040

Tembusan :

1. Manajer
2. Arsip

Lampiran III Dokumentasi

Informan Kunci



Informan Utama



Informan Tambahan (Masyarakat)



Bus Trans Metro Deli





Kartu E-Money Bus Trans Metro Deli



Terminal Bus Trans Metro Deli Pinang Baris

